

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN USAHA PENDIRIAN KAFE DI KOTA MEDAN

ABSTRAK

WINNIE STEPHANIE (213309032005)

Kegiatan usaha untuk mendirikan Kafe membutuhkan izin dari instansi pemerintah Kota Medan. Perizinan merupakan salah satu alat pemerintah sebagai alat hukum yang digunakan untuk mengontrol perilaku warganya, izin tersebut merupakan persetujuan pihak berwenang berdasarkan hukum atau peraturan pemerintah, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan yang melarang undang-undang. Namun masih terdapat banyak pelaku usaha kafe di Kota Medan yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di kota Medan? 2) Apa kendala yang timbul dari pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di kota Medan? 3) Bagaimana penerapan sanksi terhadap kafe yang tidak memiliki izin usaha pendirian kafe di kota Medan?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di Kota Medan. 2) Untuk mengetahui kendala yang timbul dari pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di Kota Medan. 3) Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap kafe yang tidak memiliki izin usaha pendirian kafe di Kota Medan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang merupakan penelitian secara wawancara dan kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 1) Pelaku usaha melakukan permohonan terkaitan NIB terlebih dahulu, Permohonan NIB dapat dilakukan melalui laman OSS atau SiCANTIK. Pelaku usaha harus mendaftarkan kegiatan usaha dalam TDUP. 2) Pelaku usaha dalam memperoleh NIB wajib melakukan pendaftaran TDUP melalui Teknik informatika yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk laman yaitu SiCantik yang dibuat dari sistem OSS, dengan tujuan dapat meringankan beban aplikasi OSS sehingga dapat mempercepat dan memaksimalkan proses izin kegiatan usaha. Namun terdapat kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam penggunaan aplikasi elektronik yang memiliki basis *online* sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengoperasikan SiCantik. 3) Berdasarkan Pasal 456 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, setiap Pelaku Usaha yang, berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Usaha di sektor pariwisata dikenai sanksi administratif berupa peringatan, sanksi pemberhentian secara sementara terhadap kegiatan usaha, denda administratif, dan pencabutan perizinan berusaha.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perizinan, Pendirian, Kegiatan Usaha, Kafe

JURIDICAL REVIEW OF KAFE ESTABLISHMENT BUSINESS LICENSE IN MEDAN CITY

ABSTRACT

WINNIE STEPHANIE (213309032005)

Business activities to establish a café require permission from Medan City government agencies. Licensing is one of the government tools as a legal tool used to control the behavior of its citizens, the permit is the approval of the authorities based on government laws or regulations, so it does not deviate from the provisions that prohibit the law. However, there are still many café business actors in Medan City who do not have licenses to carry out business activities.

The focus of this research is: 1) How is the implementation of the implementation of the café establishment business license in the city of Medan? 2) What are the obstacles arising from the implementation of the application of a café establishment business license in the city of Medan? 3) How are sanctions applied to Kafes that do not have a café establishment business license in the city of Medan?

The objectives of this study are: 1) To determine the implementation of the implementation of the café establishment business license in Medan City. 2) To find out the obstacles arising from the implementation of the application of a café establishment business license in Medan City. 3) To find out the application of sanctions against Kafes that do not have a café establishment business license in Medan City.

The type of research used in the preparation of this research is a type of empirical normative legal research. This study used a data collection method which is an interview and literature research that is analyzed descriptively.

The conclusion of the results of this study is 1) Business actors apply for NIB related first, NIB applications can be made through the OSS or SiCANTIK pages. Business actors must register business activities in TDUP. 2) Business actors in obtaining NIB are required to register TDUP through informatics techniques made by the government in the form of a website, namely SiCantik which is made from the OSS system, with the aim of easing the burden of OSS applications so as to speed up and maximize the business activity permit process. However, there is a lack of knowledge of business actors in using electronic applications that have an online base so that business actors have difficulty in operating SiCantik. 3) Based on Article 456 of Government Regulation No. 5 of 2021, every Business Actor who, based on the results of supervision, is found to have committed nonconformities or violations of Business Licensing in the tourism sector is subject to administrative sanctions in the form of warnings, Temporary suspension of business activities, administrative fines, and revocation of business licenses.

Keyword: Implementation, Permission, Establishment, Business, Kafe